

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peran dan fungsi manajemen bank sangat berpengaruh terhadap kinerja bank tersebut. Keberhasilan suatu bank untuk dapat menghasilkan suatu keuntungan merupakan suatu prestasi yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam mengelola banknya secara baik dan benar. Dengan demikian berhasil atau tidaknya kegiatan operasional suatu bank sangat tergantung dengan kemampuan dari manajemen tersebut mengelola masing-masing banknya. disamping besarnya peran manajemen dalam mengelola bank agar dapat menghasilkan kinerja yang baik, peran dari pemilik bank itu sendiri cukup besar untuk memberikan kontribusi dalam memilih manajemen yang bagus.

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai pada akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga di akibatkan oleh belum di implementasikannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi, hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang apabila disertai tiga tindakan penting, yakni yang pertama adalah ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, yang kedua adalah pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan yang ketiga adalah pengawasan yang efektif dari otorisasi pengawasan bank. Kajian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis

di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan komisaris; ketiga, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian *merger* dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pandangan eksternal; dan kelima, ketidak memadainya pengawasan oleh para kreditor.

Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Menurut Husnan Suad (2007), kelemahan di dalam penerapan *good corporate governance* merupakan salah satu sumber kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya perekonomian negara-negara tersebut pada tahun 1997 dan 1998. Menurut Achmad Daniri (2005), tantangan terkini yang dihadapi karena prinsip-prinsip dan praktik *good corporate governance* masih belum dipahami secara luas oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya.

Hessel Nogi S. Tanglisan (2003:9) berpendapat bahwa munculnya krisis ekonomi, khususnya krisis korporasi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, merupakan krisis *corporate transparency* yang sering melibatkan hubungan antara pemerintah dan dunia usaha, antara pengutang (*holders of debt*) dan pemberi utang yang seringkali melibatkan praktik *kronisme*. Pada era reformasi hal ini menuntut pembongkaran praktik-praktik lama yang tidak lagi sejalan dengan prinsip dasar pengelolaan usaha yang sehat. Dalam konteks ini berbagai penyimpangan terhadap norma-norma *good corporate governance*, seperti pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sektor

perbankan. Permasalahan yang sama juga dialami oleh dunia perbankan nasional. Oleh sebab itu, penerapan tata kelola yang baik pada *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan keharusan dan landasan penting bagi keberhasilan mewujudkan visi dan misi serta kelangsungan usaha dalam perbankan. Penerapan GCG saat ini tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis perbankan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai dan sebagai upaya agar bank dapat bertahan dalam persaingan.

Pada pasca-krisis keuangan, *Corporate governance* pada industri perbankan di negara berkembang seperti halnya di Indonesia menjadi semakin penting mengingat beberapa hal. Pertama, menurut King dan Levine (2003), bank menduduki posisi dominan dalam sistem ekonomi, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Kedua, negara yang ditandai oleh pasar modal yang belum berkembang, bank berperan utama bagi sumber pembiayaan perusahaan. Ketiga, bank merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional. Keempat, menurut Arun dan Turner (2003), liberalisasi sistem perbankan baik melalui privatisasi maupun diregulasi ekonomi menyebabkan manajer bank memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menjalankan operasi bank.

Sebagai mana di kemukakan oleh Caprio dan Levine (2002) terdapat dua hal yang saling terkait mengenai lembaga intermediasi perbankan yang berpengaruh terhadap *corporate governance*. Pertama, bank merupakan sektor usaha yang tidak transparan, sehingga memungkinkan terjadinya masalah keagenan. Kedua, bank merupakan sektor usaha yang memiliki tingkat regulasi

tinggi yang dalam hal tertentu justru menghambat mekanisme *corporate governance*. Masalah keagenan dalam sector keuangan perbankan pada hakekatnya dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama masalah keagenan akibat utang (*debt agency problem*) dan kedua, masalah keagenan akibat pemisahan kepemilikan dan pengendalian (*separatiation of ownership and control*).

Institusi keuangan perbankan memiliki sifat usaha yang spesifik (*nature of the firm*) yang membedakannya dari institusi non-keuangan (Macey dan O'Hara, 2003) sifat usaha spesifik tersebut mendorong topik penelitian dalam industry perbankan dewasa ini mengarah pada masalah *corporate governance* terlebih lagi setelah beberapa Negara Asia terkena dampak krisis finansial (Arun dan Turner, 2003). Selain itu industri perbankan merupakan industri "kepercayaan". Jika investor berkurang kepercayaannya karena laporan keuangan yang biasa dari tindakan manajemen, maka mereka akan melakukan penarikan dana secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan *rush*. Oleh karena itu kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan untuk menjaga "kepercayaan" tersebut. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks dan resiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) di bidang perbankan dan juga untuk menghindari kemungkinan tindakan kriminal yang dilakukan oleh calon nasabah melalui penyesuaian kebijakan dan prosedur internal, prinsip mengenal nasabah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)

No.19/10/PBI/2017 tanggal 13 September 2017 mengenai Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu, ketaatan akan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* antara lain transparansi (*transparency*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*) dalam menjalankan perbankan dan segala prosedur yang ada didalamnya haruslah terlaksana dengan baik agar perbankan dapat berkembang dengan baik dan sehat. Salah satunya dalam prosedur pemberian kredit, dalam hal ini prinsip - prinsip *good corporate governance* haruslah dilaksanakan dengan baik agar dapat mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam prosedur dan strategi serta memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki.

Moh Wahyudi Zakarsyi (2008:4) berpendapat bahwa pada masa sekarang banyak masalah yang dihadapi oleh pihak bank terutama yang menyangkut kondisii kesehatan keuangan dikarenakan kurangnya penerapan prinsip-prinsip *good corporate*. Masalah yang sering muncul adalah kredit bermasalah, bahkan ada kredit yang menjadi macet sehingga harus diputihkan. Secara teori banyak bank yang memberikan pinjaman dengan jaminan yang tidak sesuai dengan jumlah pinjaman akan berakibat buruk pada bank tersebut misalnya mengalami kebangkrutan dan likuidasi dari pemerintah. Untuk mengatasi terjadinya hal ini, maka pihak bank seyogyanya melakukan upaya pencegahan seperti meneliti

apakah barang jaminan melebihi nilai pinjaman, apakah pihak kreditur mempunyai kemampuan menyelesaikan utangnya pada bank dan berapa lama batas waktu yang dapat diberikan pada pihak kreditur terhadap penyelesaian utangnya pada bank.

Thomas Suyatno (2007:14) mendefinisikan. kredit adalah suatu penyediaan uang yang dapat disamakan dengan suatu tagihan-tagihannya yang sesuai dengan persetujuan antara peminjam dan yang meminjamkan. Proses pemberian kredit pada bank sebenarnya dimulai pada saat debitur mengajukan permohonan kredit dengan membawa persyaratan lengkap untuk kemudian dilakukan analisis. Setelah melakukan analisis kredit, maka kegiatan yang harus dilakukan oleh bank dalam rangka mengamankan fasilitas kredit yang diberikan adalah kegiatan pengelolaan dan pengawasan kredit yang dilakukan secara administratif maupun langsung.

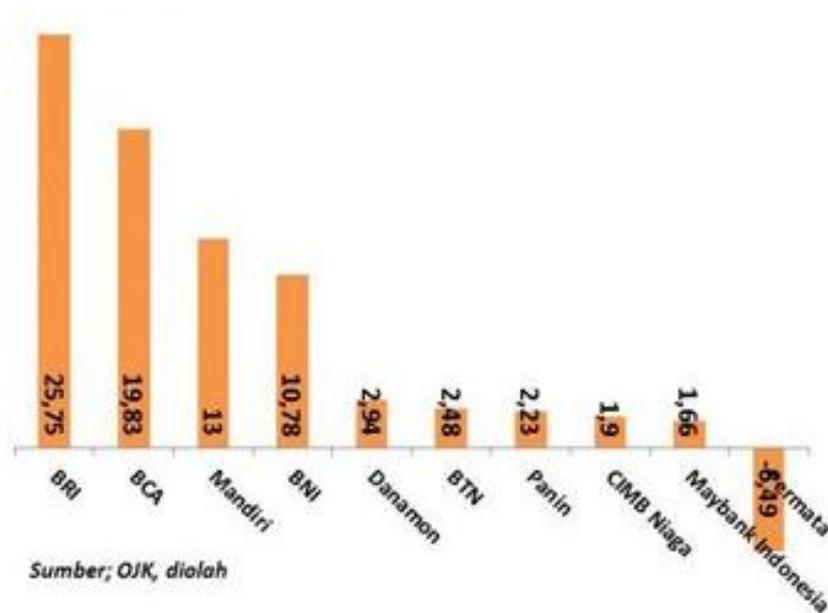
Pengendalian kredit merupakan bagian dari pengendalian internal yang bertujuan untuk menjaga agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Pengendalian ini berguna untuk mengarahkan laju kegiatan perbankan agar tetap mengikuti tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian dianggap penting karena akan mempengaruhi setiap aspek operasional bank. Untuk mengendalikan kredit, bank perlu menetapkan kebijakan kreditnya. Kebijakan ini kemudian berfungsi sebagai standar. Apabila kemudian dalam pelaksanaan pemberian kredit tidak dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka bank perlu melakukan perbaikan.

Kondisi sulit pada tahun 2016 tak hanya memukul bank-bank kecil dan menengah, tetapi juga bank-bank besar. Sejumlah bank papan atas bahkan mencatat kinerja yang amat buruk sehingga akhirnya merugi. Namun, tak semua bank kinerjanya menurun pada tahun 2016. Beberapa bank yang menerapkan strategi yang baik, dapat mencatat kinerja yang bagus. Situasi tersebut akhirnya menyebabkan peta persaingan bank berubah. Pada kelompok 10 bank terbesar misalnya, terjadi perubahan peringkat yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. (M. Fajar Marta/Kompas.com)

Tabel 1.1
Bank Penyalur Kredit Terbesar Tahun 2016

NAMA BANK	JUMLAH KREDIT (TRILIUN)	BESAR KREDIT (%)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Rp663,4	11,4
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp662	11,2
PT Bank Central Asia Tbk	Rp416	7,3
PT BNI (Persero) Tbk	Rp398,28	20,6
PT Bank CIMB Niaga Tbk	RP180,16	1,6
PT BTN (Persero) Tbk	Rp164,44	18,34
PT Pan Indonesia Bank Tbk	Rp134,63	6,14
PT Bank Permata Tbk	Rp115,7	20,5
PT Maybank (Persero) Tbk	Rp124,9	(8)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Rp9,61	(23)

Sumber : BI, OJK diolah



Gambar 1.1
Laba Bersih 10 Bank Besar per 2016 (Rp Triliun)

Berdasarkan tabel 1.1 dan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk terus memperkokoh posisinya sebagai bank dengan jumlah penyalur kredit terbesar dengan jumlah 663, 4 triliun pada tahun 2016 atau mengalami peningkatan sebesar 11,4 persen hingga laba terbesar di Indonesia dengan jumlah 94.788 miliar atau meningkat sebesar 25,75 persen. Dengan tetap *focus* melayani *sector* Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dengan jaringan distribusi yang menjangkau hingga pelosok Nusantara, termasuk melalui Teras BRI dan satelit BRIsat

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum mendefinisikan risiko kredit adalah potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan *counterparty* dalam memenuhi

kewajiban kepada Bank. Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur risiko kredit adalah rasio *Non Performing Loan* (NPL).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatatkan peningkatan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) ke kisaran 2,23 persen pada tahun 2017 dari posisi tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2016 yang berada di kisaran 2,13 persen (CNN Indonesia, 25 Januari 2018). Setelah perusahaan melakukan langkah penghapusan buku (*write off*), ternyata NPL PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dilihat hanya membengkak sebesar Rp 9 triliun. Meski NPL membengkak, namun pertumbuhan kredit BRI pada tahun 2017 mencatatkan pertumbuhan. Penyaluran kreditnya mencapai Rp739,3 triliun atau mengalami peningkatan 11,4 persen dari tahun 2016 sebesar Rp663,4 triliun.

Adapun penyaluran kredit ini ditopang oleh bisnis utama bank, yaitu kredit untuk segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tercatat, penyaluran kredit UMKM mencapai Rp551,9 triliun atau meningkat sebesar 74,65 persen dari total penyaluran kredit. Sisanya, ke non-UMKM sekitar Rp187,4 triliun atau meningkat sebesar 25,35 persen dari total kredit. Secara rinci, kredit mikro mencapai Rp239,5 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,2 persen, kredit konsumen sebesar Rp114,6 triliun atau meningkat 14,4 persen, dan kredit ritel serta menengah mencapai Rp197,8 triliun atau meningkat 13,2 persen. Khusus untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), perseroan berhasil menyalurkan hingga Rp69,4 triliun kepada 3,7 juta debitur. Sementara itu, penyaluran kredit perseroan ke segmen korporasi swasta sebesar Rp90,3 triliun atau mengalami

pertumbuhan sebesar 7,4 persen. Adapun kredit ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp97,1 triliun atau meningkat sebesar 4,6 persen.

Dari sisi laba, perusahaan berhasil membukukan laba sebesar Rp 29,04 triliun pada tahun 2017 atau mengalami pertumbuhan sebesar 10,74 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan 2016 sebesar 26,23 triliun. Adapun, asset perbankan pelat merah itu mengalami peningkatan sebesar 12,2 persen dari Rp 1.003,6 triliun menjadi Rp 1.126,2 triliun.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pemberian Kredit BRIGUNA Lembaga Perbankan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tuban."**

1.2. Penjelasan Judul

Dalam penjelasan judul dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil (2010: 1487). Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang (2007: 104). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

2. *Good Corporate Governance*

World Bank mendefinisikan *good corporate governance* sebagai berikut:

“kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

Komite *Cadbury* yang dikutip Adrian Sutedi (2012: 1) mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah “mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.”

3. **Kredit**

Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 Nopember 1998 Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 11:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

4. **BRIGuna**

Kredit BRIGuna yaitu Kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran yang berasal dari sumber penghasilan

tetap/*fixed income* (gaji/uang pensiun). Kredit BRIGuna terdiri atas Kredit Pegawai Tetap (KRETAP) dan Kredit Pensiunan (KRESUN).

5. Lembaga Keuangan Perbankan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ditinjau dari transparansi (*transparency*) dalam pemberian kredit ?
2. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ditinjau dari kemandirian (*independence*) dalam pemberian kredit ?
3. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ditinjau dari akuntabilitas (*accountability*) dalam pemberian kredit ?
4. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ditinjau dari pertanggungjawaban (*responsibility*) dalam pemberian kredit ?
5. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ditinjau dari kewajaran (*fairness*) dalam pemberian kredit ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ditinjau dari transparansi (*transparency*) dalam pemberian kredit.
2. Untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ditinjau dari kemandirian (*independence*) dalam pemberian kredit.
3. Untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ditinjau dari akuntabilitas (*accountability*) dalam pemberian kredit.
4. Untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ditinjau dari pertanggungjawaban (*responsibility*) dalam pemberian kredit.
5. Untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ditinjau dari kewajaran (*fairness*) dalam pemberian kredit.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pemberian kredit.
2. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur yang tepat dalam pengajuan kredit di bank.
3. Sebagai sumbangan pemikiran apakah *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank sudah berjalan baik atau belum dalam pemberian kredit di bank.

1.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan meliputi:

1.6.1. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer, di mana data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan sumber data. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuisisioner maupun dengan wawancara yang telah terstruktur kepada responden yang dituju. Pengumpulan data dilakukan dengan membuat suatu daftar pertanyaan dalam bentuk kuisisioner kemudian akan dibagikan kepada responden untuk dijawab sesuai dengan kenyataan dari responden dan tanpa adanya kebohongan atau manipulasi karena untuk mendapatkan suatu data yang valid.

Populasi dalam penelitian ini adalah bagian Asisten Manajemen Pemasaran, *Supervisor*, *Account Officer* Kredit Briguna, dan *Staff Administrasi* Kredit Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Nasabah. Sehingga, teknik sampling yang akan digunakan adalah *random sampling*. *Random sampling* adalah sesuatu cara pengambilan sample yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Maksudnya jika elemen populasinya ada 100 dan yang akan dijadikan sampel adalah 55, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan $55/100$ untuk bisa dipilih menjadi sample.

1.6.2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dengan cara penyebaran kuisisioner maupun dengan wawancara yang telah terstruktur kepada responden yang dituju. Pengumpulan data dilakukan dengan membuat suatu daftar pertanyaan dalam bentuk kuisisioner kemudian akan dibagikan kepada responden untuk dijawab

sesuai dengan kenyataan dari responden dan tanpa dan adanya kebohongan atau manipulasi karena untuk mendapatkan suatu data yang *valid*.

Pertanyaan yang digunakan pada kuisisioner adalah pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup yaitu responden hanya dapat menjawab pertanyaan dengan pilihan yang telah disediakan. Berikut adalah isi pertanyaan pada kuisisioner yang akan diberikan kepada sample bagian Manajemen Risiko, *Account Officer* Kredit Briguna, dan *Staff Administrasi Kredit* Briguna:

Transparansi	
Aspek	Judul
Laporan Keuangan	Maryani, M. 2012
Penyampaian informasi produk dan jasa bank	Maryani, M. 2012
Layanan pengaduan	Maryani, M. 2012

Akuntabilitas	
Aspek	Judul
Bersikap siap dalam melayani	Dedi Joko. 2014
Menciptakan hubungan yang baik	Dedi Joko. 2014
Tanggap terhadap permintaan nasabah	Dedi Joko. 2014
Menumbuhkan rasa percaya para nasabah	Lelys Listiawati. 2012
Satpam bersedia membantu	Lelys Listiawati. 2012

Pertanggungjawaban	
Aspek	Judul
Mematuhi komitmen	Maryani, M. 2012
Merahasiakan identitas nasabah	Maryani, M. 2012
Pelayanan yang cepat	Lelys Listiawati. 2012
Ruangan yang bersih	Lelys Listiawati. 2012

Kemandirian	
Aspek	Judul
Memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan	Maryani, M. 2012
Menjalankan aktivitas dengan baik	Maryani, M. 2012
Menjawab pertanyaan dengan baik	Lelys Listiawati. 2012

Keadilan	
Aspek	Judul
Menyebutkan nama nasabah	Lelys Listiawati. 2012
Berperilaku adil	Maryani, M. 2012
Melayani sesuai urutan	Dedi Joko. 2014

1.6.3. Wawancara

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Interview (wawancara). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Alasan pemilihan model ini dimaksudkan untuk membuat penjelasan mengenai hubungan yang dimunculkan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi penelitian yang dilakukan disini adalah untuk mengetahui seberapa besar penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pemberian Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tuban.